

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009),

Busrizalti, M. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Bandung: Total Media.

Dailibas, D. S. (2013). *Sistem Pengadilan Intern Pemerintah*. Jakarta: PPM..

Fakrulloh, Z. A. (2011). *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum Sebuah Pencarian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hasyimzoem, Y. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah* . Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ismu, T. T. (2005). *Hukum Tata Usaha Negara an Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: PT Kencana .

Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

RESMITA, Y. S. (2017). Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat . *jurnal pemerintahan daerah*, 51-67.

Santoso Edi, e. a. (2003). *Otonomi Daerah (Cappacity Building dan Penguatan Demokrasi Loca)*. Semarang : Puskodak UNDIP.

Soekanto,S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali pers.

Sunindhia, Y. (2008). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

JURNAL

Amini, n. w. (2017). Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. *jurnal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik undip*, 50-62.

Diamantina, A. (2006). Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien. *Amalia Diamantina, pengawasan pemerintahan daerah*, 47-72.

ilyas, h. (volume 4, No.4 Desember 2012). Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka . *jurnal bina praja*, 273-280.

KAI, L. (tahun 2021). Tugas Dan Fungsi Gubernur Dalam Pembinaan Dan . *Tesis, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*.

Sori, B. L. (volume 3, No 16 tahun 2016). Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Jurnal*, 77-92.

Sugianto, B. (Jurnal Lex Librum, Vol. VI No.1, Desember 2019). Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Internal. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, hal. 93 - 106.

Yuniar, M. A. (volume 5, No 4, tahun 2016). Pelaksanaan Dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangkapengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*, 27-39.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.